

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arto, M., 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M., 2002 . *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti .
- Hamzah, A., 1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta. Yogyakarta: Liberty.
- Harsono, B., 2005 . *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Muhammad, A. k., 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Projodikoro, R. W., 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum: dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Rifai, A., 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, M. S., 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

### B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 (51/1960) Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533

### C. JURNAL

Butarbutar, E. N., 2011. Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata. *Dinamika Hukum*, Volume 11, pp. 470 - 479.

Febriana, E. N. (2017, Agustus 29). *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Retrieved Maret 30, 2021, from <https://media.neliti.com/media/publications/217522-pengelolaan-barang-milik-daerah-berdasar.pdf> Lentera Hukum:

Kusumadara, A. (2013). Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki? *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

- Lestari, A. W. (2016). Tesis Status Hukum Tanah yang dikuasai Secara Turun Temurun Oleh Masyarakat Lomponengko Kabupaten Gowa (Legal Status Of Land Controlled by Lomponengko community Of Gowa Regency From Generation To Generation).
- Ramelan, E., 2000. Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999. *Majalah Yuridika*, Volume 15, p. 196.
- Shabrina, K. N. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Simatupang, D. P. (2010). Retrieved Maret 30, 2021, from Laporan Akhir Tim Analisa dan valuasi Peraturan Perundang - Undangan tentang Aset Negara (UU No 51 Prp Tahun 1960): <https://bphn.go.id/data/documents/assetnegara.pdf>
- Sitanggang, R. d. (2014). Perolehan Hak Milik Berdasarkan Pasal 1963 KUHPerduta dan Undang - Undang Pokok Agraria Terkait Benda Tak Bergerak (Tanah). *FH UI*.
- Wantu, F. M., 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Dinamika Hukum*, Volume 12, p. 482.
- Wijayanta, T. S. D. F. A. K. B. H. H. H. S. d. R. S., 2010. Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar Hukum*, Volume 22, pp. 572 - 587.

#### **D. INTERNET**

- A.Y.Tiara, 2016. *Hak Atas Tanah*. [Online] <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1403/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y> diakses pada tanggal 8 Desember 2020
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015, Desember). Retrieved from Badan Pembinaan Hukum Nasional Web site: [https://bphn.go.id/data/documents/penelitian\\_hak\\_menguasai\\_negara\\_di\\_bid\\_pertanahan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/penelitian_hak_menguasai_negara_di_bid_pertanahan.pdf)

- Dr. Riana Kesuma Ayu, S. M., 2016. *http://konsultanhukum.web.id*. [Online] *http://konsultanhukum.web.id /unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum* diakses pada tanggal 2 Desember 2020
- Eskanugraha, A. P. (2015). Peralihan Tanah yang dikuasai oleh Negara. *hukumonline.com*.
- Faizal, A. (2020, Maret 10). *regional.kompas*. Retrieved from regional.kompas Web Site: <https://regional.kompas.com/read/2020/03/10/19192171/4-hal-ini-jadi-dasar-pemkot-surabaya-ajukan-banding-setelah-kalah-di?page=all>
- Febriana, E. N. (2017, Agustus 29). *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Dipetik Maret 30, 2021, dari Lentera Hukum: <https://media.neliti.com/media/publications/217522-pengelolaan-barang-milik-daerah-berdasar.pdf>
- Santoso, U., n.d. *media.neliti.com*. [Online] <https://media.neliti.com/media/publications/40585-eksistensi-hak-pengelolaan-dalam-hukum-t-36880399.pdf>\_Diakses pada tanggal 9 Desember 2020
- Simatupang, D. P. (2010). Dipetik Maret 30, 2021, dari Laporan Akhir Tim Analisa dan valuasi Peraturan Perundang - Undangan tentang Aset Negara (UU No 51 Prp Tahun 1960): <https://bphn.go.id/data/documents/assetnegara.pdf>
- Sitanggang, R. d. (2014). Perolehan Hak Milik Berdasarkan Pasal 1963 KUHPerduta dan Undang - Undang Pokok Agraria Terkait Benda Tak Bergerak (Tanah). *FH UI*.